ANGKRINGAN
Buletin BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Edisi 2 Tahun 2021

BPK PERWAKILAN PROVINSI DIY KEMBALI TERCEPAT MENYERAHKAN LHP ATAS LKPD PROVINSI SE-INDONESIA

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2020 pada Kamis (22/04) merupakan penyerahan LHP pertama untuk Provinsi se-Indonesia. Hal tersebut merupakan prestasi berulang dari tahun lalu.

Penyerahan LHP ini diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Agus Joko Pramono, dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Yogyakarta Nuryadi dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rapat Paripurna DPRD di Yogyakarta.

Hadir dalam kegiatan tersebut para Anggota DPD RI melalui virtual, para Wakil Ketua DPRD DIY, Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam X, Gubernur Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Auditor Utama Keuangan Negara V Dr. Akhsanul Khaq, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Jariyatna, para Pejabat Struktural BPK dan Pemerintah Provinsi Yogyakarta, serta Tim Pemeriksa. Dalam pidatonya Dr. Agus Joko Pramono menyampaikan Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Daerah DIY TA 2020. Pemerintah Daerah DIY telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2010 atau sudah 11 kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

(bersambung ke halaman 2)

(sambungan halaman 1)

Pada kesempatan ini, selain menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disampaikan pula LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020.

Pemeriksaan ini sejalan dengan RPJM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang mencantumkan salah satu tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025.

BPK meminta Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ketua DPRD menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY Ini, kami akan mempelajari dan mencermati secara seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Hal tersebut menjadi acuan bagi kita semua agar kedepan di dalam mengelola keuangan daerah semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Nuryadi berharap hasil pencermatan ini akan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah DIY kedepan lebih baik lagi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur DIY menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran BPK Perwakilan DIY yang telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2020.

Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap pada waktu yang akan datang, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu kami mohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik eksekutif maupun legislatif serta ohon bimbingan dari BPK Perwakilan DIY.

Kata Mutiara

"Apabila kita menginginkan hal besar terjadi di hidup kita, maka kita juga harus siap untuk melakukan perjuangan yang lebih besar juga".

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Jariyatna menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bantul. LHP tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada Jumat (23/04).

Kepala BPK Perwakilan DIY, Jariyatna menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD, dan Bupati Bantul beserta jajaran atas kerja samanya, sehingga secara bersama-sama, kita selalu berusaha dan berkomitmen mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Jariyatna juga menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah berhasil meraih opini WTP untuk kali ke-9 ini, dan tradisi yang baik ini dapat terus dipertahankan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DIY atas kerjasamanya yang telah terbina dengan baik. Kerjasama ini kami harapkan untuk dapat lebih ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bantul menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan DIY beserta jajarannya yang telah menjadi mitra navigasi, fasilitator dan mitra kerja yang mendukung proses pembelajaran dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Bantul

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Jariyatna me-nyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. LHP tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Wiwik Widiastuti dan Bupati Gunungkidul Sunaryanta pada Jumat (30/04).

Kepala BPK Perwakilan DIY, Jariyatna menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD, dan Bupati Gunungkidul beserta jajaran atas kerja samanya, sehingga secara bersama-sama, kita selalu berusaha dan berkomitmen mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel.

Jariyatna juga menyampaikan selamat kepada Pemkab Gunungkidul yang telah berhasil meraih opini WTP untuk kali ke-6 ini, dan tradisi yang baik ini dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan lagi.

Wakil Ketua DPRD menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan DIY dan jajarannya yang telah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA 2020. Kami DPRD Kabupaten Gunungkidul yang memiliki fungsi pengawasan akan mendorong Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk secepatnya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK beserta hasil rekomendasi BPK.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Gunungkidul menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan DIY beserta jajarannya atas kerjasamanya yang baik. Kerjasama ini kami harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang.

Kata Mutiara

"Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik, hanya karena orang lain tidak memberimu penghargaan"

WISATA DAN BUDAYA JOGJA

Mengenal Tari Klasik di Keraton Yogyakarta

Tari klasik gaya Yogyakarta telah ada sejak berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono I bukan sekadar mencintai seni tari, namun ia juga merupakan penari yang handal. Semasa ia memerintah, ia menciptakan beragam tarian seperti Beksan Lawung, Beksan Etheng, dan dramatari Wayang Wong.

Tari-tari tersebut awalnya tumbuh dan diajarkan di dalam lingkup tembok keraton. Baru pada 17 Agustus 1918, tari klasik gaya Yogyakarta mulai diperkenalkan keluar dari keraton dengan ditandai berdirinya perkumpulan Krida Beksa Wirama.

Tari yang lahir dan berkembang di dalam keraton dapat dibagi dalam beberapa kategori seperti tari tunggal, Beksan, Srimpi, dan Bedhaya.

Tari tunggal dibawakan hanya oleh seorang penari, seperti tari Klana Raja, tari Klana Alus, dan tari Golek.

Beksan, yang sebenarnya juga berarti "tari", dapat dibagi menjadi Beksan Petilan yang dilakukan berpasangan dan Beksan Sekawanan yang didukung empat penari atau kelipatannya.

Ada berbagai macam beksan, seperti Beksan Lawung, Beksan Anglingkusuma, Beksan Jangerana, dan Beksan Panji Ketawang. Di antara tarian tersebut, Beksan Lawung menempati posisi khusus karena ditempatkan sebagai tari kenegaraan. Bahkan keberadaannya dianggap sebagai wakil dari Sultan saat ada resepsi perkawinan agung di Kepatihan.

Tari Srimpi adalah tarian lemah gemulai yang biasanya ditarikan oleh empat penari, kecuali Srimpi Renggowati yang ditarikan oleh lima orang. Ada berbagai macam tari srimpi seperti Srimpi Pandelori, Srimpi Jebeng, Srimpi Muncar, dan Srimpi Pramugari.

Tari Bedhaya dibawakan oleh sembilan penari, dibandingkan dengan ragam lainnya, tari ini dianggap lebih tua dan sakral. Terdapat beberapa tari Bedhaya seperti Bedhaya Semang, Bedhaya Bedah Madiun, Bedhaya Sinom, dan Bedhaya Tirta Hayuningrat.

Di antara tari-tari tersebut, terdapat dua tarian yang dianggap sakral keduanya adalah Srimpi Renggowati dan Bedhaya Semang.

https://www.kratonjogja.id/kagungan-dalem/13/tari-klasik-di-keraton-yogyakarta

Galeri Foto

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional di lingkungan pelaksana BPK RI oleh Sekretaris Jenderal secara daring

Pertemuan dengan Inspektur Derah Provinsi D.I. Yogyakarta

Pertemuan Kepala Perwakilan dengan Wakil Gubernur di Kepatihan, DIY

Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) di Auditorium BPK Perwakilan DIY

REDAKSI ANGKRINGAN

Pengarah : Jariyatna
Penanggungjawab : Pujo Sumekto
Pemimpin Redaksi : E. Arie Noerachmawati

Tim Redaksi : Damar R, Wahyu B. Dwiarto
Alamat : BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta
Website : yogyakarta.bpk.go.id
Email : humastu.yogyakarta@bpk.go.id